

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten**

DPPKD Provinsi Banten dibentuk berdasarkan peraturan daerah provinsi Banten nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Banten yang kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

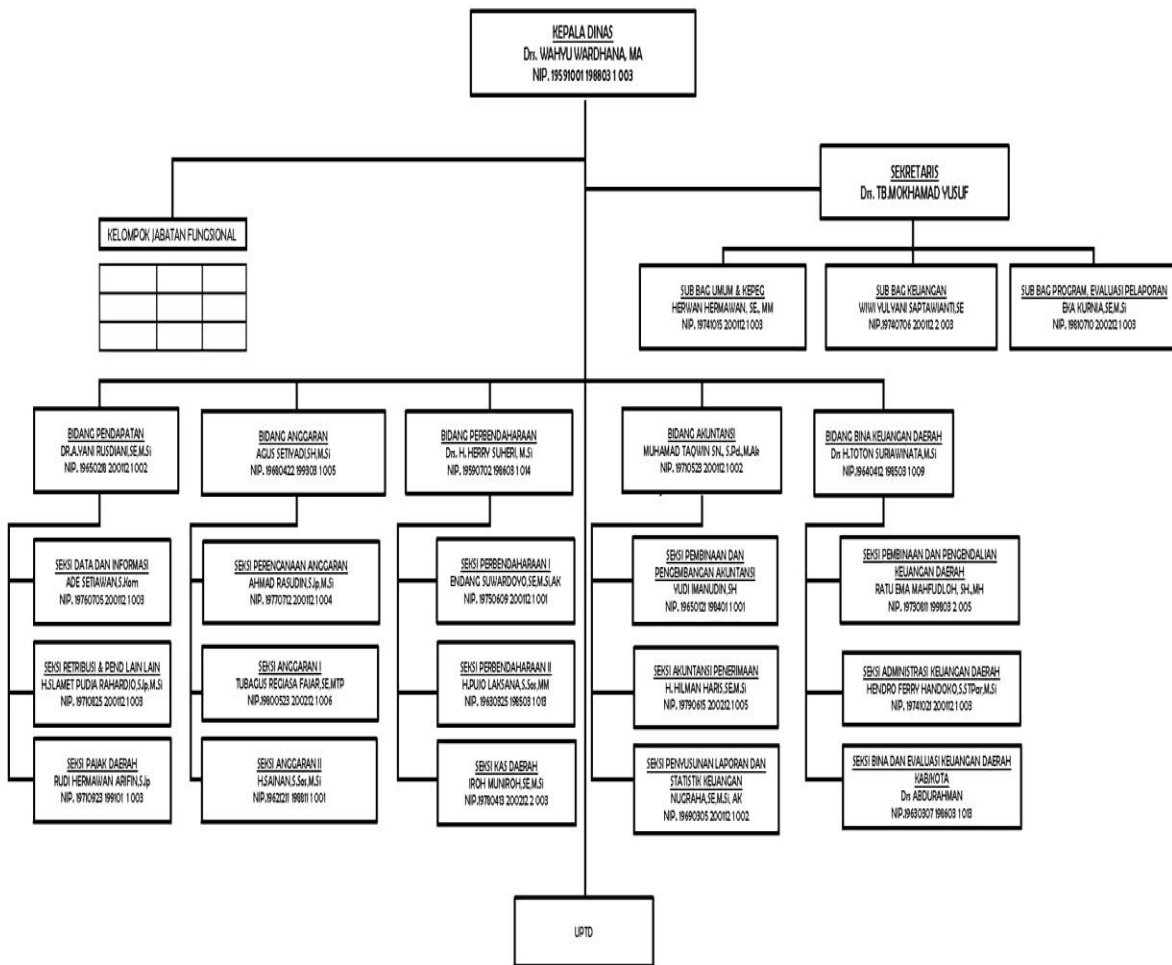
Tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah pendapatan tugas pembantu dibidang daerah dan pengelolaan daerah, dengan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang profesional guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Misi: Meningkatkan pendapatan daerah sesuai potensi, Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, dan Peningkatan kapabilitas kelembagaan.

2. Struktur Organisasi DPPKD Provinsi Banten

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Data Diambil Dari Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

## B. Hasil Penelitian dan Pemahasan

### 1. Hasil penelitian

#### a. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah/Provinsi Banten

Pendapatan Pajak Daerah adalah penerimaan pajak daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dipungut berdasarkan daerah atau wilayah yang telah ditentukan tempat-tempatnya. Berikut ini adalah penerimaan pajak berdasarkan daerah/wilayah.

**Tabel 4.1**

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Banten 2014-2016<sup>2</sup>

NO	UPT	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	UPT DPPKD KOTA SERANG	98,996,105,678	160,258,523,819	128,343,544,869
2	UPT DPPKD PANDEGLANG	99,177,078,788	57,581,688,522	64,612,870,276
3	UPT DPPKD LEBAK	234,961,567,235	172,360,723,034	184,762,691,193
4	UPT DPPKD MALINGPING	43,195,678,678	294,366,803,108	302,370,242,431
5	UPT DPPKD CILEGON	937,673,498,092	1,138,697,212,420	1,169,072,344,872
6	UPT DPPKD CIKOKOL KOTA TANGERANG	788,787,765,677	480,057,960,371	356,297,683,096
7	UPT DPPKD CILEDUG KOTA TANGERANG	964,685,295,379	672,749,908,287	680,316,091,293
8	UPT DPPKD BALARAJA KAB. TANGERANG	303,709,975,678	225,509,444,858	270,350,932,983

<sup>2</sup>Data Diambil Dari Laporan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Banten.

9	UPT DPPKD SERPONG KOTA TANGSEL	789,729,078,912	693,262,645,753	708,918,168,910
10	UPT DPPKD CIPUTAT KOTA TANGSEL	311,561,899,213	468,400,863,472	486,406,367,610

b. Jumlah pendapatan dari PBBKB untuk kabupaten/kota di provinsi Banten.

Pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai penengluaran-pengeluaran daerah. Penerimaan pajak daerah adalah salah satu sumber dana yang penting bagi pembiayaan di daerah. salah satunya pajak daerah di provinsi Banten adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang menyumbangkan pajak daerah tersebut.

Berikut ini data pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan daerah pemungutannya.

**Tabel 4.2**

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Banten  
2014-2016<sup>3</sup>

NO	UPT	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	UPT DPPKD KOTA SERANG	92,884,102,849	120,174,523,811	55,539,129,122
2	UPT DPPKD PANDEGLANG	37,177,060,635	57,276,423,081	83,308,693,683

<sup>3</sup>Data Diambil Dari Laporan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Banten.

3	UPT DPPKD LEBAK	128,961,314,147	57,454,701,749	51,299,051,742
4	UPT DPPKD MALINGPING	22,195,511,425	38,541,760,044	51,707,150,763
5	UPT DPPKD CILEGON	937,673,498,092	22,486,652,417	34,683,538,000
6	UPT DPPKD CIKOKOL KOTA TANGERANG	431,484,472,838	14,991,101,608	21,083,511,232
7	UPT DPPKD CILEDUG KOTA TANGERANG	614,675,255,362	92,513,896,811	14,055,674,154
8	UPT DPPKD BALARAJA KAB. TANGERANG	183,701,272,323	133,126,826,628	77,820,532,823
9	UPT DPPKD SERPONG KOTA TANGSEL	610,729,076,012	88,751,217,750	124,522,041,151
10	UPT DPPKD CIPUTAT KOTA TANGSEL	410,351,359,213	173,317,838,728	83,014,694,101

## 2. Hasil Analisis Data

### a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata – rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bauran promosi sebagai variabel independen, dan peningkatan penjualan variabel dependen. Variabel – variabel tersebut akan diuji secara statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS.16.0 seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	30	14055674154	937673498092	162183396076.47	218888678764.021
Y	30	43195678678	1169072344872	442905821816.90	333612972870.655
Valid N (listwise)	30				

*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*

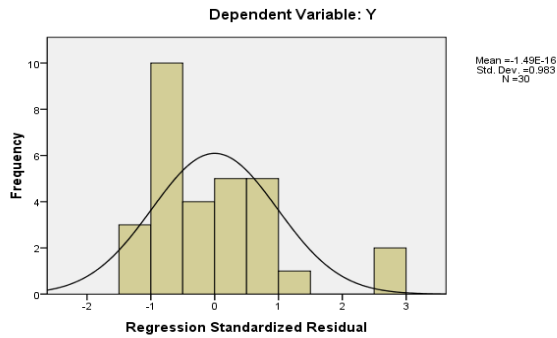
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai maksimum variabel X (pajak bahan bakar kendaraan bermotor) adalah Rp.937,673,498,092, dan nilai minimum sebesar Rp.14,055,674,154. Sedangkan pada variabel Y (pendapatan daerah) nilai maksimum adalah sebesar Rp. 1,169,072,344,872unit dan nilai minimum sebesar Rp. 43,195,678,678.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas Data

Salah satu cara untuk menguji kenormalan data adalah dengan melihat histogram. Untuk melihat distribusi normalitas dari model dapat dilihat pada gambar berikut:

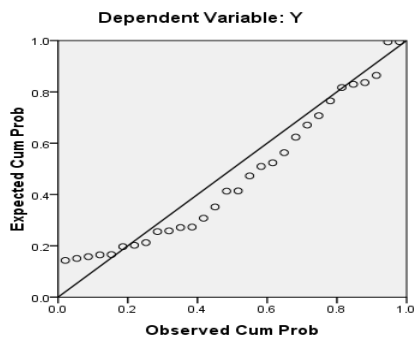
**Gambar 4.2**  
Histogram Normalitas Data  
Histogram



*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*

Dari gambar histogram 4.2 dapat dilihat model berdistribusi normal karena berbentuk lonceng. Selain dari gambar histogram uji kenormalitasan dapat juga dilakukan dengan grafik plot pobabilitas normal, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

**Gambar 4.3**  
Grafik Normal P-P Plot Regression Standardized Residual  
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*

Dari grafik Normal P-P Plot menunjukkan pada grafik yang normal, hal ini terlihat dari titik - titik data yang terletak disekitar garis lurus diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji kenormalan data dipenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas, maka dapat dilakukan dengan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Berikut ini tabel 4.4 yang menunjukkan multikolinearitas.

**Tabel 4.4**  
Hasil Uji Multikolinearitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*



Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* karena nilai *Tolerance* sebesar 1.000 tidak kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hasil yang sama, nilai *Inflation Factor* sebesar 1.000 yang berarti tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

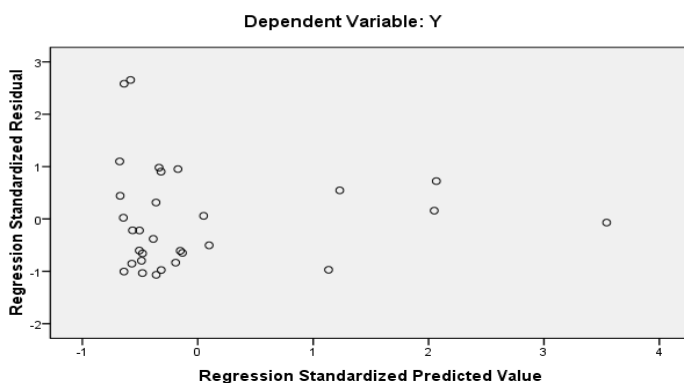
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara *ZRESID* dan *ZPRED*. Jika terdapat pola tertentu seperti titik – titik yang ada pada suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

Sebaliknya jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

#### Gambar 4.4

##### Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

## d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung dengan Durbin Watson tabel yaitu batas lebih tinggi (*upper bond* atau dU) dan batas lebih rendah (*lower bond* atau dL) dengan menggunakan metode Cochrane Orcutt. Dalam perhitungan SPSS versi 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.436 <sup>a</sup>	.190	.162	305479401761.296	1.627

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*

Dari tabel 4.5 diatas, nilai DW (Durbin Watson) adalah sebesar 1.627. Nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai  $\alpha = 5\%$  dan jumlah data (n) adalah 30, serta jumlah variable independen (k) adalah 1. Jadi dapat dilihat dari nilai dL dan dU masing – masing.  $dL=1.352$ ,  $dU = 1.489$ , dan  $DW = 1.627$ .

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berada pada daerah tidak ada autokorelasi.

#### 4. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi sederhana, yaitu dilakukan melalui uji regresi linear sederhana, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan uji statistik t.

##### a. Analisis Regresi Sederhana

Pengujian persamaan regresi dilakukan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen (pajak bahan bakar kendaraan bermotor) terhadap variabel dependen (pendapatan daerah) dengan bantuan program SPSS versi 16.0 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
Uji Regresi Sederhana  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	335028911691.083	69836693004.937		4.797	.000
X	.665	.259	.436	2.567	.016

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas dapat ditentukan persamaan regresi sederhana yaitu:

$$Y = 335.028.911.691.083 + 0.665$$

Maka interpretasi dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta dari unstandardized coefficients sebesar 335.028.911.691.083, hal tersebut menyatakan bahwa jika pendapatan = 0 (nol), maka nilai Y (Pendapatan Daerah) adalah sebesar 375.985.489.866.140.
- b. Nilai koefisien regresi variabel PBBKB sebesar 0.665 menyatakan bahwa jika PBBKB mengalami kenaikan Rp. 1 maka nilai Y (Pendapatan Daerah) mengalami peningkatan sebesar 0.665.

## **5. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Uji koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara variabel dependen dan independen. Adapun hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
 Hasil Uji Koefisien Korelasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.436 <sup>a</sup>	.190	.162	305479401761.296	1.627

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi dengan nilai  $r$  sebesar 0,436 atau 43,6% (bertanda positif) yang berarti nilai koefisien korelasi bergerak antara 0 sampai +1, dimana nilai tersebut mendekati nilai +1 maka artinya hubungan koefisien korelasi sedang.

## 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $r^2$ )

Nilai  $r^2$  (koefisien determinasi) dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4.8**  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.436 <sup>a</sup>	.190	.162	305479401761.296	1.627

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*

Pada tabel 4.8 nilai R Square ( $r^2$ ) sebesar 0,190 atau 19,0%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak bahan bakar kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 19,0%, sedangkan sisanya 81,0% (100% - 19,0%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## 7. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing – masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji t dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.9 dibawah ini.

**Tabel 4.9**

Hasil Uji Statistik t

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	335028911691.083	69836693004.937		4.797	.000
X	.665	.259	.436	2.567	.016

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0*

Dari tabel 4.9 pendapatan mempunyai nilai t hitung sebesar 2.567 dengan tingkat signifikan 0,00, nilai tersebut adalah nilai mutlak. Kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel yang berpedoman  $(n - k - 1) = 33 - 1 - 1 = 31$ , maka  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $2.567 > 2.039$ ) maka dapat disimpulkan bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor mempengaruhi pendapatan daerah secara positif dan signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

### **C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Dalam Perspektif Islam**

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan ebbaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 26; An-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain.



Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“ Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pajak dan zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Apapun entitasnya baik individu maupun korporat. Terutama individu karena untuk korporat

---

<sup>4</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 160.

atau perusahaan belum ada kesepakatan kesatuan pemikiran dari para ulama Indonesia. Walau demikian, sudah banyak perusahaan yang membayar zakat atas dasar kesadaran berkontribusi. Dengan praktik pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang masih bingung mengenai dua hal ini, ada yang beranggapan bahwa keduanya saling menegasikan dan ada juga yang berpendapat bahwa keduanya saling berdiri sendiri, serta kombinasi pelakuan lainnya.

Dan prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar pajak dan zakat. Di Pajak batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan nishab jika pada zakat.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

- a. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut perpajakan dapat memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid syariah.

- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.